

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

RISCHA MAYLINDA

NPM 5117500244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

RISCHA MAYLINDA

NPM 5117500244

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Februari 2021

Pembimbing I



DR. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum
NIDN. 0022105601

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

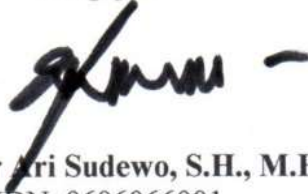
RISCHA MAYLINDA

NPM 5117500244

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, Februari 2021

Penguji I



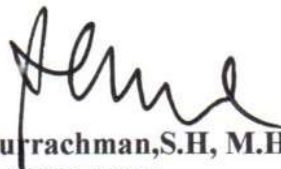
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H
NIDN. 0606066001

Penguji II



Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 0020045801

Pembimbing I



DR. Hamidah Abdurrahman, S.H., M.Hum
NIDN. 0022105601

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rischa Maylinda
NPM : 5117500244
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 Mei 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dengan ini saya menyatakan Skripsi ini adalah orisinal hasil karya yang dibuat oleh penulis, serta tidak dibuatkan oleh orang lain. Apabila suatu hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Tegal, Februari 2021

Menyatakan



Rischa Maylinda

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup bebas tanpa diskriminasi, korban perdagangan manusia tidak hanya pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki. Dalam tindak pidana perdagangan manusia terdapat 3 unsur, yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban sudah diatur dalam hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menganalisis formulasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan melalui wawancara. Metode analisis data kualitatif, pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, data literatur, kemudian disusun menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan formulasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia diatur dalam hukum positif dan pelaksanaan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diberikan pada tingkatan kepolisian, kejaksaan, dan dipengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Human trafficking is a form of human rights crime, namely the right to live freely without discrimination, victims of human trafficking are not only vulnerable groups such as women and children, but also men. In the criminal act of human trafficking, there are 3 elements, namely: elements of process, method and exploitation. If all three are fulfilled, it can be categorized as human trafficking.

The efforts of the Government of Indonesia in providing protection for victims have been regulated in positive law and statutory regulations. This writing analyzes the formulation of legal protection for victims of human trafficking and form of legal protection for victims of human trafficking in the criminal justice system in Indonesia.

This research uses normative-empirical legal research. Data collection techniques are carried out through literature and through interviews. Qualitative data analysis methods, deep processing of data from observations, interviews, literature data, then compiled to produce descriptive data.

The results of this study indicate that the formulation of legal protection against victims of human trafficking is regulated in positive law and the implementation of legal protection in the criminal justice system in Indonesia is given at the police, prosecutor's and court levels.

Based on the research results, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.

Keywords: Human Trafficking, Legal Protection

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rukyat dan Ibu Sri Utaminingsih
2. Adik penulis yaitu Rita Marthya dan Muhammad Umar Yusuf.
3. Suami penulis Lukman Hakim
4. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Serta semua pembaca skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

MOTTO

“ A person is a success if they gets up in the morning and gets to bed at night and in between does what he wants to do”

“ Jangan pernah mundur apabila kamu telah melangkah maju”

“Mimpi hanya akan terus jadi mimpi jika mimpi itu tetap dibawa mimpi. Jangan takut bermimpi! Terus impikan, renungkan, dan berusaha MEWUJUDKAN”

Rischa Maylinda

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Hukum. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rosulullah, SAW yang membawa rahmat sekalian alam.

Selesaiannya Skripsi ini tentu tidak terlepas dari dorongan dan bantuan-bantuan serta uluran tangan dari berbagai pihak, sehingga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag (Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal)
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H (Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum)
4. H. Toni Hartoyo, S.H., M.H (Wakil Dekan II Bidang Akademik Fakultas Hukum)

5. Imam Asmarudin, S.H., M.H (Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Hukum)
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H (Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum)
7. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis selama penulis menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum. Semoga bapak dan ibu dosen selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhannahu Wa Ta'ala serta amal jariyah Aamiin.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik.
10. Orang tua Bapak H. Rukyat dan Ibu Hj. Sri Utaminingsih, adik-adik Rita Marthya dan Muhammad Umar Yusuf, dan suami tercinta Abi Lukman Hakim yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Segenap teman-teman penulis dan teman seperjuangan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Wabillahaufik walhidayah, Wassalamualaikum.wr.wb

Tegal, Februari 2021

Penulis

Rischa Maylinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11

1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Tentang Perdagangan Manusia	16
1. Pengertian human trafficking menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	17
2. Pengertian human trafficking menurut KUHP	19
3. Pengertian human trafficking menurut RKUHP (2019).....	21
4. Pengertian human trafficking menurut KEPRES RI Nomor 88 Tahun 2002	22
B. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan.....	24
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak- Pidana Perdagangan Manusia	33
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdag- angan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .	47
1. Perlindungan korban perdagangan manusia di tingkat kepolisian	48

2. Perlindungan korban perdagangan manusia	
di tingkat kejaksaan.....	54
3. Perlindungan korban perdagangan manusia	
di tingkat Pengadilan.....	56
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 formulasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban perdagangan manusia.....	35
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan hukum nasional adalah *sustainable development or reform* (pembangunan atau reformasi yang berkelanjutan). Orientasi dari pembangunan hukum nasional yaitu untuk mewujudkan pengabdian sistem hukum nasional terhadap kepentingan nasional yang sumber materinya berasal dari keyakinan dan cara pandang bangsa Indonesia¹.

Kemajemukan sistem hukum akan tetap dipertahankan walaupun di Indonesia pembangunan hukum masih dalam taraf pembangunan dan pembaharuan. Hal tersebut dilakukan agar terjadi peningkatan kepastian hukum, kesadaran hukum, penegakkan hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum yang bersumber pada kebenaran dan keadilan demi ketertiban, keteraturan, dan kelancaran pembangunan nasional².

Jumlah penduduk yang terus bertambah yang diiringi oleh kehidupan sosial kemasyarakatan yang juga terus berkembang dapat mengakibatkan munculnya beraneka ragam penyakit masyarakat yang yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat

¹Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, Hlm 93

²Marulak Pardede, *Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Negara Republik Indonesia*, De Jure; Jurnal Penelitian Hukum Vol. 16, 2016. Hlm. 126

diperlukan untuk menghadapi berbagai tuntutan agar ketertiban, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 tanggal 19 Oktober 1999 dalam BAB II mengenai kondisi umum telah dikemukakan: Saat berupaya untuk menegakkan hukum sering menghasilkan adanya kontroversi. Pada satu sisi, terjadi peningkatan pembinaan aparatur, produk materi hukum, dan fasilitas hukum. Tetapi di sisi lain, adanya ketidakseimbangan peningkatan profesionalisme dan integritas moral aparat penegak hukum, kualitas pelayanan, kesadaran hukum, dan tidak terdapatnya keadilan dan kepastian yang berakibat pada belum terwujudnya supremasi hukum. Fakta dilapangan yang memperlihatkan bahwa terjadi fenomena meningkatnya pembinaan aparatur, produk materi hukum, dan fasilitas hukum belum diikuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta aparat penegak hukumnya. Selain itu, adanya praktik penegakkan hukum juga sering disertai oleh adanya intervensi pihak tertentu, kerancuan dan tumpang tindih hukum di Indonesia dapat berakibat pada munculnya krisis hukum³.

Resesi ekonomi dan krisis moneter berkelanjutan mengakibatkan banyaknya keluarga yang tidak dapat bekerja karena di PHK dari tempat mereka bekerja⁴.Oleh karena itu, berbagai strategi direncanakan untuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh banyak keluarga termasuk

³Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 44

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika aditama, 2012.Hlm. 30

dengan menyuruh anak-anak untuk bekerja. Hal tersebut sering disebabkan oleh, ingin cepat kaya, jeratan hutang, dan kebiasaan yang telah menjadi budaya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya *human trafficking* (perdagangan manusia). Para pelaku *human trafficking* beranggapan bahwa cara seperti itu dapat menghasilkan uang secara instan yaitu dengan memperkejakan anak yang masih dibawah umur agar kebutuhan keluarganya terpenuhi.

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Berdasarkan pemberitaan bahwa *human trafficking* saat ini telah menjadi permasalahan dunia yang sangat serius karena pelakunya sudah meraup keuntungan yang besar. Semakin berganti tahun, kejahatan *human trafficking* pun semakin bertambah kuantitas kualitasnya. Perempuan dan anak banyak yang menjadi korban *human trafficking* yang setiap tahunnya diprediksi terdapat 2 (dua) juta manusia-manusia diperjual belikan.⁵

Tindak pidana *human trafficking* harus dipahami secara luas yang tidak hanya berfokus pada korban perempuan dan anak karena tindak pidana tersebut juga terjadi pada tenaga kerja tanpa upah ataupun tenaga kerja rendah. Berdasarkan fakta lapangan, adanya buruh dengan upah rendah dan mobilitas penduduk mengakibatkan munculnya banyak kesempatan untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Anak-anak, wanita, dan pria, dijadikan seperti barang dagangan untuk beragam

⁵Dra.Farhana,S.H.,M.H., M.Pdi, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, SinarGafika, 2010, Hlm.5

tujuan, tanpa terkecuali sebagai pertambangan, konstruksi, pabrik, perikanan, perkebunan, pertanian, dan pekerja rumah tangga, pekerja seks paksa, perdagangan pengantin dan lain sebagainya.

Perdagangan manusia adalah wujud dari perbudakan modern ditingkat internasional maupun nasional. Perkembangan komunikasi, teknologi informasi, dan transportasi mengakibatkan semakin canggihnya modus ini. *Human trafficking* bukanlah *ordinary crime* tetapi sudah menjadi *extra ordinary crime* yang terorganisasi (*organized*) yang dilakukan secara *transnational* (lintas negara) sehingga termasuk ke dalam kategori *transnational organized crime* (TOC)”.⁶ Perdagangan manusia juga termasuk kedalam kejahatan terhadap HAM yaitu hak untuk memilik kehidupan yang bebas tanpa diskriminasi, kejahatan terhadap HAM tersebut melanggar ketentuan yang tertuang di dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28I Ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”. Oleh karena itu hak asasi adalah mutlak dan tidak boleh dicampuri oleh siapapun, karena setiap individu merupakan makhluk Tuhan YME yang mempunyai hak dasar sesuai dengan kemuliaan martabat dan harkatnya yang dilindungi oleh UUD NKRI 1945 dan Pancasila.

Praktik *human trafficking* menjadi ancaman serius terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara,

⁶SupriyadiWidodoEddyono, *PerdaganganManusia dalam Rancangan KUHP*, Elsam, 2005, Hlm. 2-3

karena bukan berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut harus dilakukan secara internasional, regional, dan nasional dengan cara melindungi dan merehabilitasi korbannya. Umumnya para korban tersebut merupakan korban penipuan yang kemudian tidak diberlakukan secara manusiawi untuk dieksploitasi. Misalnya, perbudakan, eksploitasi seksual, penjualan organ tubuh, dan penjualan bayi. Tindakan tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi para pelakunya.⁷

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *human trafficking*, yaitu: unsur proses, cara, dan eksploitasi. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka tindakan pelaku termasuk kedalam *human trafficking*. Eksploitasi yang dilakukan pelaku akan sangat merugikan korbannya, karena korban akan dieksploitasi secara seksual, perbudakan, kerja paksa, atau organ tubuh korban akan diperjual belikan. Perlindungan hukum sangat perlu dilakukan bagi korban, bahkan diperlukan pendampingan oleh pemerintah kepada korban untuk menghilangkan trauma sehingga dapat menjalani kehidupannya lagi secara normal.

Bentuk perlindungan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji formulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *human trafficking* yang tertuang dalam Undang-Undang, dan bagaimana bentuk perlindungan tersebut dalam sistem peradilan pidana. Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi

⁷Dra. Farhana., *Op.cit.* Hlm. 6

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu :

- 1) Bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui formulasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan bisamemberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Penulis

juga berharap penelitian ini dapat memberikan kepastian tentang perlindungan hukum terhadap korban serta mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari riset ini diharapkan bisa memberikan bantuan masukan pengetahuan di bidang hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, agar suatu tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir dan dapat dicegah.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada beberapa jurnal dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Definisi perdagangan orang terdapat pada UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi yang digunakan diambil dari protokol PBB tentang *human trafficking*⁸. Permasalahan *human trafficking* ini sangat terkait erat dengan perlindungan dan korban. Kejahatan yang terus tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari korban. Korban yang dimaksud adalah

⁸Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

objek dari tindak pidana, namun secara hukum dan sosial korban termasuk kedalam subjek yang harus dilindungi. Korban adalah individu/kelompok/masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung yang mengalami suatu gangguan akibat dari sasaran suatu kejahatan. Menurut deklarasi PBB “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*” pada angka 1 korban kejahatanyaitu:

“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power”.

Deklarasi PBB berisi beberapa point pembahasan diantaranya *Victims of crime* (Korban Kejahatan), *Victims of abuse of power* (Korban Penyalahgunaan Kekuasaan), sejalan dengan pengertian korban dalam deklarasi PBB diatas, Arif memberikan pengertian korban adalah Korban tersebut akan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh individu lain untuk memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak dan kepentingan HAM pihak korban (Arif Gosita, 1989:75).

2. Tindak pidana *human trafficking* adalah tindakan oknum tertentu demi mendapatkan laba/keuntungan yang banyak bagi pelakunya dan korbannya akan mendapatkan kerugian yang cukup banyak dari jasmani ataupun rohani. Faktor penyebab tindak pidana *human trafficking* dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu faktor internal ataupun eksternal, faktor

sosial dan faktor ekonomi. Pelaku kejahatan *human trafficking* akan memperoleh sanksi penjara ataupun harus membayar denda yang wajib dilaksanakan sedangkan korbannya harus memperoleh hak untuk dilindungi secara hukum sebagaimana yang tercantum pada UU No. 21 Tahun 2007. Contohnya, hak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya, hak untuk mendapatkan rehabilitasi (integrasi, sosial, pemulangan, dan kesehatan), dan hak untuk memperoleh ganti rugi (restitusi) secara ekonomi ataupun fisik. Ahli waris korban pun harus mendapatkan hak restitusi dan perlindungan hukum jika korban *human trafficking* telah meninggal dunia yang diakibatkan oleh TPPO⁹.

3. Buku dengan judul “*Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*”. Oleh Dra. Farhana, SH, MH, MPDI. Buku ini membahas: Pengertian TPPO di Indonesia berdasarkan KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Ruang lingkup pelaku TPPO ini meliputi penyelidikan dan penyidikan, sanksi, dan perlindungan hukum bagi korban TPPO. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghapus *human trafficking* ini sejak tahun 2002 hingga sekarang sudah mulai menunjukkan hasil. Walaupun standar minimal masih belum dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia untuk menghapus *human trafficking*, tetapi berbagai upaya telah dicoba pemerintah untuk menghapusnya. Sejak disahkannya UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

⁹Anggie rizqita dan ridwan arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, *Res Judicat*, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2019, Hlm. 182

Perlindungan Anak, Keppres RAN Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak No.59 Tahun 2002, Keppres RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak No.87 Tahun 2002, dan Keppres RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Nomor 88 Tahun 2002, dan berbagai aksi yang dilakukan oleh ormas, LSM, Kepolisian, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan masuknya Indonesia sebagai peringkat kedua pada akhir bulan juni 2003 sebagai negara yang sudah mengupayakan penghapusan *human trafficking*. Hal tersebut menjadi upaya awal yang baik untuk terus memantapkan komitmen pemerintah Indonesia¹⁰.

4. Skripsi yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilakukan Di Surakarta” yang ditulis pada tahun 2007 oleh Susi Wahyuningsih yakni mahasiswa dari FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, menjelaskan dalam skripsinya mengenai perlindungan hukum bagi korban dibedakan menjadi dua yaitu: perlindungan hukum bagi calon korban dan perlindungan hukum setelah menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi calon korban kejahatan merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti secara tidak langsung ada perlindungan *in abstracto*

¹⁰Dra. Farhana., *Op.cit.* Hlm. 152

secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Perlindungan hukum setelah menjadi korban kejahatan oleh hukum pidana diatur dalam Pasal 14c KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka hakim memvonis pidana bersyarat yaitu terpidana harus memberikan ganti rugi baik semua atau sebagian kepada korban. Bagi korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan tidak hanya membutuhkan pembeian ganti rugi saja tetapi mereka juga membutuhkan pemberian rehabilitasi, bantuan kesehatan dan juga bantuan hukum¹¹.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu riset yang sumbernya berasal dari pustaka seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan lain.¹² Sesuai dengan judul penelitian dikarenakan pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* pada sistem peradilan pidana, dan identifikasi masalah mengenai formulasi terhadap perlindungan hukumnya dan pelaksanaan perlindungan hukumnya, maka dalam

¹¹Susi Wahyuningsih, “Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 64.

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 26.

membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan data primer dan sekunder, sumber datanya didapat melalui *interview* dengan salah satu hakim PN Brebes mengenai perdagangan manusia.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris (hukum terapan) yaitu dengan menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yang ditambahi dengan penjelasan dari beberapa unsur secara empiris.

Pendekatan penelitian yang digunakan akan mengkaji implementasi/pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (hukum positif) secara *in action* dan kontrak secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat agar dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan. Pengkajian yang dilakukan ditujukan untuk memberikan kepastian apakah hasil implementasi pada peristiwa hukum *in concreto* telah sesuai atau tidak dengan perundang-undangan ataupun ketentuan yang sudah disepakati. Penelitian hukum terapan (normatif-empiris) diawali dari ketentuan perundang-undangan (hukum positif tertulis) yang diterapkan pada suatu kejadian hukum *in concreto* di lingkungan masyarakat. Implementasinya bisa diwujudkan dengan cara *real action* (aksi nyata) dan *legal document* (dokumen hukum). Berdasarkan pemahaman tersebut maka hasil penerapan ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan yang sudah

disepakati telah dilaksanakan dengan baik atau tidak¹³. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang konflik hukum yang diselesaikan melalui pengadilan (*judicial case study*).

c. Sumber Data

Riset ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil *interview* langsung dengan narasumber mengenai materi yang diteliti. Sumber data sekunder didapat dari secara tidak langsung (perantara) misalnya dari peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah kalangan hukum dan referensi dari situs internet mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada riset ini yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu kajian secara teori, literatur ilmiah, dan referensi lainnya yang terkait dengan aspek perkembangan sosial seperti norma, nilai, dan budaya yang diteliti.¹⁴ Data sekunder untuk studi pustaka pada riset ini berasal dari jurnal, buku, karya ilmiah kalangan hukum, peraturan perundang-undangan dan referensi dari situs internet tentang upaya perlindungan hukum bagi korban TPPO secara tekstual ataupun secara online.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53-54

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 2011.hlm 38.

2. Penelitian Lapangan (*Interview*)

Metode *interview* merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber tentang persepsi umum dan permasalahan yang terkait dengan inti permasalahan penelitian. Penulis mewawancarai hakim PN Brebes. Interview yang dilakukan dapat sesuai dengan struktur yang telah dibuat ataupun tidak dan prosesnya bisa melalui telepon ataupun tatap muka.¹⁵ Interview yang akan dilakukan secara terarah dimana pelaksanaannya sudah ditentukan melalui poin-poin utama berupa pertanyaan sudah dicatat/ditentukan sesuai dengan inti permasalahan yang akan dibahas agar tidak melenceng dari batas-batas permasalahan yang akan dikaji.

e. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pengkajian secara detail suatu data dari hasil observasi, interview, dan data literatur. Metode ini adalah tahapan dari suatu riset yang mendeskripsikan suatu data dengan menuliskannya melalui kata-kata ataupun secara lisan dari perilaku individu yang diobservasi. Kesimpulan yang dihasilkan mempergunakan logika induktif dari yang sifatnya khusus menjadi umum¹⁶. Hasil analisis dan kajian selanjutnya dideskripsikan lebih mendalam dengan mempertajaman pembahasan hukum untuk memberikan kesimpulan dari hasil kajian bentuk perlindungan hukum TPPO pada sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 38

¹⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan pada riset ini yaitu:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab tinjauan konseptual menguraikan tinjauan tentang perdagangan manusia, tinjauan tentang korban kejahatan, tinjauan tentang perlindungan hukum, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang termuat dalam judul ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam hal penelitian dan pembahasan, penulis menguraikan mengenai formulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia, serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

BAB IV Penutup. Dalam bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Bab IV berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Perdagangan Manusia

Secara umum definisi *human trafficking* menurut protokol PBB banyak dijadikan referensi definisi untuk menghadapi, mengurangi, dan menghukum pelaku *human trafficking*.¹⁷ Definisi perdagangan manusia yang sering digunakan antara lain:

- 1) Penerimaan, penampungan, pemindahan, pengiriman, dan perekrutan melalui cara:

Penggunaan kekerasan/ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ataupun posisi rentan atau menerima/memberi pembayaran atau mendapatkan keuntungan supaya bisa mendapatkan persetujuan dari penguasa atas individu lain untuk dieksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud adalah melacurkan orang lain (eksploitasi seksual), praktik perbudakan (kerja paksa, pengambilan organ tubuh, atau penghambaan). Bentuk-bentuk ancaman kekerasan yaitu gerakan tubuh (dengan alat ataupun tidak), simbol, gambar, tulisan, dan ucapan yang mengakibatkan korban merasa ketakutan atau kebebasan seseorang secara hakiki telah dikekang.

¹⁷Dra. Farhana, *op.cit.*, Hlm. 20

- 2) Korban *human trafficking* menyetujui untuk dieksploitasi meskipun bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, hal ini pun sudah termasuk cara dalam praktik *human trafficking*.
- 3) Penerimaan, penampungan, pemindahan, pengiriman, dan perekrutan korban anak untuk dieksploitasi sudah termasuk ke dalam “*human trafficking*” meskipun tindakan ini tidak tercantum pada point 1.

Setiap tindakan penerimaan, penampungan, pemindahan, pengiriman, dan perekrutan korban anak untuk dieksploitasi dapat dikategorikan sebagai *human trafficking* meskipun tidak melalui penipuan atau pemaksaan. Hal tersebut dikarenakan korban anak *human trafficking* tidak dapat memenuhi unsur kedua, yaitu korban diajak melalui kekerasan, ancaman, penipuan, tipu daya, penculikan, penyalahgunaan kedudukan/kekuasaan atau pemberian/penerimaan pembayaran dari sesuatu yang menguntungkan untuk mendapatkan persetujuan pelaku *human trafficking*.

Sejumlah definisi *human trafficking* juga terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Pengertian *human trafficking* menurut UU Pemberantasan TPPO

No/21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1:

Perdagangan Orang merupakan suatu perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman, penangkapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan posisi/kekuasaan yang rentan, pemberi bayaran/manfaat, atau penjeratan utang sehingga orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut menyetujuinya, baik dilakukan di dalam negara ataupun lintas negara, untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang lain tereksploitasi.

Kata “eksploitasi” dalam UU Pemberantasan TPPO No.21 Tahun 2007

Pasal 1 Angka 7 berbeda dengan “eksploitasi seksual”.

Eksplorasi merupakan suatu perbuatan dengan/tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada menjadikan seseorang menjadi pelacur, kerja/pelayanan paksa, perbudakan atau sejenisnya, pemerasan, penindasan, pemanfaatan organ reproduksi, seksual, fisik, atau melakukan perlawanan hukum dengan mentransplantasikan/memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh/memanfaatkan kemampuan/tenaga seseorang oleh pihak lain untuk menghasilkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.

Eksplorasi Seksual merupakan semua perbuatan yang memanfaatkan organ tubuh seksual/tubuh lainnya dari korban untuk memperoleh keuntungan yang tidak hanya terbatas pada seluruh aktivitas pencabulan dan pelacuran saja (UU Pemberantasan TPPO No.21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 8).

Berdasarkan definisi tersebut maka *human trafficking* memiliki 3 unsur yaitu:

1. Perbuatan:

Menerima, menyembunyikan, memindahkan, mengangkut, dan merekrut.

2. Sarana/Cara untuk mengendalikan korban:

Pengancaman, menggunakan secara paksa, segala bentuk penyalahgunaan posisi/ kekuasaan yang rentan, kecurangan, penipuan, penculikan, kekerasan atau memberi/menerima pembayaran/keuntungan agar orang yang memiliki kendali atas korban menyetujuinya.

3. Tujuan:

Tujuan eksploitasi TPPO adalah untuk prostitusi/seksual lain, untuk komersial, perbudakan, kerja paksa, pengambilan organ tubuh, dan penghambatan.

Unsur tujuan menjadi prioritas yang harus diperhatikan sebab pada korban anak meskipun unsurnya tidak dibatasi oleh ada tidaknya sarananya, namun tujuan pelaku menjadi hal yang tidak boleh dikesampingkan.

2. Pengertian *human trafficking* menurut KUHP

Pada KUHP Pasal 297 yang berbunyi: “Perdagangan anak laki-laki dibawah umur dan wanita, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun”. Bunyi pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian *human trafficking* sehingga tidak bisa ditentukan berbagai unsur apa saja yang akan diterapkan oleh penegak hukum untuk membuktikan dan mengajukan tuntutan atas ada tidaknya TPPO khususnya bagi anak laki-laki dibawah umur dan wanita.

KUHP Pasal 297 lebih difokuskan pada diserahkannya wanita untuk dijadikan pelacur, pengiriman, dan perekrutannya. Faktanya, *human trafficking* pada anak laki-laki yang belum dewasa dan wanita dapat bertujuan untuk eksploitasi tenaga kerja atau perbudakan. Penjelasan pasal

tersebut bukanlah penjelasan dari negara (tidak resmi) ataupun dari KUHP.¹⁸

Pada KUHP Pasal 297, anak laki-laki dibawah umur dan wanita banyak mengakibatkan multitafsir atas definisi di bawah umur, apakah dikenakan kepada anak laki-laki yang dibawah umur dan wanita, atau anak laki-laki masih dibawah umur sedangkan wanitanya sudah dewasa. Berdasarkan penafsiran tersebut mengakibatkan laki-laki dewasa dan anak perempuan tidak terlindungi. Sistem interpretasi negatif dianut oleh Asas Hukum Pidana artinya dalam KUHP tidak memperbolehkan ada interpretasi lain selain yang sudah dicantumkan.

Kata “perdagangan” tidak dijelaskan pada Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. R. Soesilo menjelaskan Pasal 297 KUHP bahwa:

...yang maksud dari perniagaan/perdagangan perempuan adalah melakukan tindakan penyerahan perempuan untuk dijadikan pelacur. Termasuk juga para pencari perempuan muda untuk dikirim keluar negeri untuk dijadikan pelacur...¹⁹

Soesilo telah mempersempit makna perniagaan untuk tujuan “prostitusi” yang selanjutnya diperkuat oleh Noyon-Langemeyer sebagaimana kutipan Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan: “Definisi perdagangan perempuan adalah seluruh tindakan langsung ditujukan untuk menempatkan perempuan pada situasi tergantung dari apa yang orang lain

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 115

¹⁹R. Soesilo, *KUHPserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, 1995, hlm. 217

mau dan menguasai perempuan agar melakukan tindakan cabul (prostitusi)”.²⁰

Wirjono Prodjodikoro memberikan kesimpulan bahwa definisi yang dimaksud tidak merujuk pada perniagaan budak belian secara umum.²¹ Pada KUHP Pasal 297 disebutkan bahwa tidak terdapat unsur pembatasan maksud/tujuan dari perniagaan wanita dan anak laki-laki, yang seharusnya siapapun bisa dikenai pasal tersebut terlepas dari maksud/tujuan orang tersebut.

3. Pengertian *human trafficking* Menurut RUU KUHP (Tahun 2019)

Pengaturan kejahatan perdagangan manusia dalam Rancangan KUHP terdapat pada BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG. Bagian ke-4 *human trafficking* yaitu pasal 461.

Pasal 461 Ayat 1 Rancangan KUHP (Tahun 2019) merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

Setiap individu yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu lain dimana individu lain tersebut diancaman dengan kekerasan, menggunakan kekerasan, penyalahgunaan posisi/kekuasaan yang rentan, menipu, memalsukan, menyekap, dan menculik, menjeratan dengan utang, atau memberikan pembayaran atau manfaat meskipun telah disetujui orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk dieksploitasi di wilayah NKRI dapat dipidana karena melakukan Tindak Pidana *human trafficking* dan dapat diancam pidana penjara tersingkat selama 3 tahun dan terlama 15 tahun atau pidana denda minimal sesuai dengan kategori IV dan maksimal sesuai dengan kategori VI.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, 1980, Hlm.128

²¹*Ibid.*, Hlm. 129

Dari pengertian diatas terdapat tiga elemen yakni:

- 1) Setiap individu yang mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu lain.
- 2) Dengan menggunakan: ancaman dengan kekerasan, menggunakan kekerasan, penyalahgunaan posisi/kekuasaan yang rentan, menipu, memalsukan, menyekap, dan menculik, menjeratan dengan utang, atau memberikan pembayaran atau manfaat.
- 3) Untuk tujuan: mengeksploitasi orang.

4. Pengertian *human trafficking* menurut Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Tindak Pidana Perdagangan anak dan perempuan adalah semuaperbuatan pelaku TPPO baik perbuatammerekrut, mengangkut antardaerah dan antarnegara, memindahtangankan, memberangkatkan, menerima dan menampung sementara/ditempat tujuan anak dan perempuan melalui kekerasan fisik dan verbal, mengancam, tipu muslihat, menculik, menipu, memanfaatkan kedudukan yang rentan (contohnya saat seseorang tidak mempunyai alternatif lain, jebakan hutang, ketergantungan obat, terisolasi, dan sebagainya), memberi/menerima pembayaran/keuntungan dimana anak dan perempuan dan anak sengaja dijadikan pelacur dan dieksploitasi secara seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran ilegal ataupun legal, pembantu rumah tangga, pekerjaan jermal, adopsi anak, pengantin pesanan, industri pornografi, mengemis, penjualan organ tubuh, pengedaran obat terlarang, dan lain-lain.

Human trafficking adalah satu dari beberapa wujud kejahatan terhadap HAM yaitu hak untuk memperoleh kehidupan yang bebas/merdeka tanpa ada diskriminasi. Manusia pada hakekatnya diberi

oleh Tuhan TME hak untuk hidup, tidak diperbudak, dan kebebasan pribadi sebagaimana disebutkan pada UU HAM Pasal 4 No.39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

HAM adalah Setiap manusia diberi hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk berpikir dan hati nurani, hak yang sama dan diakui di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasar pada hukum yang tidak dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

Oleh karena itu hak asasi adalah mutlak dan tidak boleh dicampuri oleh siapapun dan hak asasi manusia harus dilindungi, karena HAM merupakan kodrat manusia saat ia dilahirkan yang melekat langsung pada dirinya dan siapapun tidak dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan sifat kemanusiaan akan hilang jika HAM tersebut dicabut. Artinya, ciri khas manusia yang berupa martabat dan harkat manusia tidak lagi diakui dan dihormati.

Maraknya perdagangan manusia saat ini tentu sangat memprihatinkan. Keterlibatan seseorang dalam *human trafficking* disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Prof. Dr. Maidin Gultom dalam bukunya bahwa terjadi peningkatan masalah perdagangan manusia khususnya perdagangan terhadap anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Untuk mengatasinya, perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai faktor penyebabnya terlebih dahulu sehingga penerapan sanksi yang tegas saja bagi pelaku tidaklah cukup²².

²²Maidin Gultom, *op.cit.*Hlm. 41

Faktor penyebab *human trafficking* yang disebutkan dalam Keppres RI No.88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak antara lain²³:

- a. Media massa
- b. Social budaya
- c. Keadaan yang memperlemah ketahanan keluarga
- d. Migrasi
- e. Pendidikan
- f. Ketenagakerjaan
- g. Kemiskinan

B. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan

Batasan definisi korban kejahatan merupakan sesuatu yang sulit untuk dirumuskan sebab luasnya aspek kehidupan. Oleh sebab itu, definisi korban menurut UU TPPO sama dengan definisi korban secara umum yaitu korban yang diakibatkan oleh TPPO. Pada UU Pemberantasan TPPO No.21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa: “Korban merupakan individu yang menderita secara fisik, psikis, mental, ekonomi, fisik dan/atau sosial yang disebabkan oleh TPPO”.

Definisi korban diatas sesuai dengan UU RI No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 Ayat 3 disebutkan: “Korban

²³Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Definisi korban juga terdapat pada Undang-undang lain yaitu:

1. UU penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004.

Korban adalah seseorang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan di lingkungan rumah tangga.

2. UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No.27 Tahun 2004.

Korban adalah individu atau sekelompok individu yang menderita kerugian, secara mental, fisik, emosional, ekonomi, atau tidak dipedulikan, perampasan, atau pengurangan hak-hak dasar yang dimilikinya, sebagai pelanggaran HAM yang berat, termasuk juga ahli waris korban.

3. PP Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat No.2 Tahun 2002.

Korban adalah individu atau sekelompok individu yang menderita yang disebabkan oleh pelanggaran HAM yang berat sehingga korban perlu untuk dilindung mental dan fisiknya dari kekerasan, teror, gangguan, dan ancaman pihak manapun.

Menurut Arif Gosita, korban yaitu mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan korban.²⁴

²⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993, Hlm64

Korban juga artikan oleh Van Boven, yang berdasarkan pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban yaitu individu atau sekelompok individu yang menderita kerugian secara fisik ataupun psikis, kerugian ekonomi, menderita secara emosional, ataupun perampasan hak-hak dasar yang nyata, baik yang disebabkan oleh tindakan (*by act*) ataupun disebabkan oleh kelalaian (*by omission*)²⁵.

Pihak yang lemah sangat identik dengan korban kejahatan baik jasmani fisik ataupun rohani, secara ekonomi, sosial, dan politik. Umumnya dapat dihubungkan dengan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa yang tidak memiliki perlindungan, tidak mengenal hukum, miskin, tidak berpendidikan dan lain-lain. Lemahnya keadaan korban bisa mengakibatkan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban. Kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan yang disadari oleh pelaku dan kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya seperti halnya TPPO.

Menurut KBBI, korban dapat didefinisikan sebagai:

1. Pihak yang menyatakan untuk berbakti (secara ikhlas dan lain-lain).
2. Pihak yang mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh tindakannya (hawa nafsu dan lain-lain) sendiri atau orang lain.
3. Orang yang meninggal.

²⁵ Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm 8

4. Orang yang meninggal dikarenakan kecelakaan atau bencana alam.²⁶

Kesimpulannya, korban adalah individu/sekelompok orang yang mengalami kerugian, termasuk cedera fisik ataupun psikis, menderita secara emosi, kerugian ekonomi ataupun kejahatan pada HAM karena tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana baik disengaja ataupun kelalaian.

Unsur yang dapat diambil dari definisi korban diatas, yaitu:

1. Orang (yang mengalami penderitaan).
2. Penderitaan secara ekonomi, mental, dan fisik.
3. Penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu wujud dari kepastian hukum yang mana hal itu merupakan cerminan bahwa NKRI adalah negara hukum, yaitu sesuai dengan isi dari UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara kita adalah negara hukum. Perlindungan dan kepastian hukum adalah hak masing-masing warga negara yaitu dijelaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, Hlm. 461

perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara dan hal ini tertera di dalam UUD 1945 pada Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pengertian perlindungan hukum menurut UU HAM No.39 Tahun 1999, “Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada”.

Dalam UU RI No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 dijelaskan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Terdapat 2 jenis kemungkinan perlindungan saksi dan/atau korban pada penyidikan *human trafficking*:

1. Pengawasan terhadap saksi yang dilindungi secara penuh dan dikelola oleh Negara.
2. Skema campuran dengan mengedepankan pendampingan, keselamatan, dan dukungan yang sudah disiapkan dari hasil kerjasama lembaga pendampingan korban dan penyidik.

Ruang lingkup perlindungan hukum pada riset ini adalah perlindungan yang difasilitasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan sebagai perangkat hukumnya (KUHP, UU Pemberantasan TPPO, UU perlindungan saksi dan korban, dan UU HAM).

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *human trafficking* pada UU Pemberantasan TPPO adalah dengan memberikan restitusi. Menurut UU No.21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13 yaitu: “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Pada dasarnya, korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan yang sebanding dengan pelaku kejahatan.²⁷ Hal tersebut mengakibatkan sesudah pengadilan memvonis pelaku kejahatan dengan sanksi pidana, keadaan korban cenderung tidak diperhatikan. Padahal penghormatan terhadap HAM dan keadilan tidak hanya diterapkan pada pelaku kejahatan saja, namun korban kejahatan juga perlu merasakannya seumur hidup.

Pada sejumlah kasus kejahatan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban lebih sering terbatas pada aspek materi, contohnya

²⁷ Farhana, *op.cit.*, Hlm. 162

korban diberikan hak untuk mengajukan tuntutan seberapa besar ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku. Harapannya, sesudah pelaku membayar ganti rugi kepada korban maka tanggung jawab pelaku akan selesai, padahal seharusnya korban pun harus mendapatkan ganti rugi secara immateriil (psikis dan fisik)²⁸.

Pada penyelesaian perkara pidana, hak-hak korban tidak terlalu diperhatikan sedangkan hak-hak terdakwa selalu diprioritaskan, seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”²⁹

Cakupan perlindungan terhadap korban dapat bersifat tidak langsung (abstrak) ataupun langsung (konkret). Perlindungan yang sifatnya abstrak adalah wujud dari perlindungan yang hanya dapat dirasakan/dinikmati secara psikis (emosional), seperti rasa puas terhadap sesuatu. Sedangkan perlindungan yang sifatnya konkret adalah wujud bentuk perlindungan yang bisa dirasakan secara nyata, seperti pemberian materi (biaya pendidikan, biaya hidup, restitusi atau kompensasi) ataupun non-materi (terbebas dari ancaman dan pemberitaan negatif).³⁰.

²⁸Drs. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, 2007, Hlm. 81

²⁹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, 1986, Hlm. 33

³⁰Ahmad Syaafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Muwazah*. Vol. 3 No. 2, Desember 2011, Hlm. 458

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, harus memperhatikan pula asas hukum. Hal tersebut dikarenakan asas hukum pada konteks hukum pidana harus dapat memberikan warna baik hukum pidana formil, hukum pidana materiil, ataupun hukum pelaksanaan pidana.³¹ Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas manfaat.

Artinya, korban tidak hanya dilindungi untuk mencapai manfaat secara materi ataupun spiritual korban kejahatan, melainkan juga manfaat secara luas yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan meminimalisasi jumlah tindak pidana.

2. Asas keadilan

Artinya, implementasi asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan tidaklah bersifat mutlak sebab pelaku kejahatan pun harus merasakan keadilan.

3. Asas keseimbangan.

Keberadaan hukum adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian atas kepentingan manusia serta untuk menata kembali keseimbangan di masyarakat yang sudah mengalami gangguan untuk dikembalikan pada kondisi awal (*restitutio in integrum*). Asas keseimbangan mendapatkan tempat yang penting dalam usaha untuk memulihkan hak-hak korban.

³¹Andi Hamzah, *op.cit* Hlm. 50

4. Asas kepastian hukum.

Bagi aparat penegak hukum, asas ini dapat menjadi pedoman hukum yang kuat ketika bertugas untuk melindungi secara hukum pada korban kejahatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Korban kejahatan *human trafficking* harus diperhatikan secara serius. Pada setiap penanganan pidana, jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum lebih sering dihadapkan 2 kepentingan yang saling bertolak belakang, yaitu kepentingan tersangka walaupun dia bersalah dan kepentingan korban untuk mengembalikan apa yang sudah dideritanya baik materi fisik, ataupun mental³².

UU KUHAP No.8 Tahun 1981 menyatakan bahwa melindungi secara hukum kepada korban yang berupa ganti rugi dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara. Penerapan KUHAP Pasal 98 - 101 yang sering terjadi adalah korban jarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sesudah perkara pidananya telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan yang ada pada KUHAP masih belum memadai untuk melindungi korban kejahatan. Meskipun demikian pada KUHAP tersebut sudah diatur sejumlah hak korban kejahatan yang dapat dipergunakan pada proses peradilan pidana, yaitu³³:

³²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *op.cit.* Hlm 25

³³*Ibid.*, Hlm.95

1. Hak untuk mengendalikan penuntut umum dan penyidik.

Merupakan hak untuk mengajukan keberatan untuk menghentikan penuntutan dan penyidikan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP).

2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi

Merupakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). Keberadaan saksi bagi korban sangatlah penting demi meraih suatu kebenaran materi. Sikap proaktif harus ditunjukkan oleh aparat penegak hukum harus sebagai jaminan keamanan kepada korban dan keluarganya ketika akan bersaksi di pengadilan.

3. Hak untuk mengajukan tuntutan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku kejahatan yang korban alami dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata (Pasal 98-101). Pemberian hak ini dapat mempermudah korban untuk mengajukan tuntutan ataskerugian yang disebabkan oleh tersangka/terdakwa.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan manusia, bentuk perlindungan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat formulasi perlindungan terhadap korban dalam tabel berikut ini:

NO	HUKUM POSITIF	SUBSTANSI
1.	KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14c Ayat (1) <p>Perlindungan korban dalam KUHP bersifat perlindungan abstrack atau perlindungan tidak langsung, dikatakan demikian karna ada syarat khusus berupa pergantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 35 <p>Selama proses pemeriksaan perkaranya baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak mendapat pendampingan oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 <p>Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 47 <p>Hak mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 48 <p>Hak untuk mendapat restitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 51 <p>Hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 54 <p>Korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Berhak memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

		<p>f. Mendapat informasi perkembangan kasus;</p> <p>g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;</p> <p>h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</p> <p>i. Dirahasiakan identitasnya;</p> <p>j. Mendapat identitas baru;</p> <p>k. Mendapat tempat kediaman sementara;</p> <p>l. Mendapat tempat kediaman baru;</p> <p>m. Memperoleh penggantian biaya transportasi;</p> <p>n. Mendapat nasihat hukum;</p> <p>o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;</p> <p>p. Mendapat pendampingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 <ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat bantuan medis. b. Mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. • Pasal 7
--	--	--

		<p>Berhak atas Kompensasi.</p> <p>Pasal 7 A</p> <p>Korban berhak memperoleh Restitusi.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77 <p>Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.</p>
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 68 <p>Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.</p>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara upaya untuk melindungi korban *human trafficking* dengan perundang-undangan:

1. KUHP

Maksud dari Pasal 14c yaitu ketika hakim menvonis pidana bersyarat, hakim juga sekaligus bisa menentukan syarat khusus bagi terpidana untuk menggantikan seluruh/sebagian kerugian dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku.

Merujuk pada KUHP Pasal 14c, maka korban hanya akan diberikan perlindungan hukum sebatas aspek materi. Faktanya, korban juga mengalami penderitaan psikis dan fisik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tidaklah sebanding dengan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan³⁴.

2. UU PTPPO No/21 Tahun 2007

Pada UU ini korban TPPO akan dilindungi secara hukum mulai dari korban/saksi menjadi pelapor kepada pihak kepolisian. Pihak advokat akan melakukan pendampingan terhadap korban selama dilangsungkannya proses perkara, identitas korban/saksi akan dirahasiakan termasuk juga keluarganya, harta benda dan jiwanya juga ikut terlindungi, berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan jika korban berada diluar negeri maka korban akan mendapatkan hak untuk dipulangkan dan hak dilindungi.

3. UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

³⁴Susi Wahyuningsih, "Upaya Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan dengan Tujuan Untuk Dilacurkan di Surakarta" Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2007, Hlm. 54

Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam UU ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Kelembagaan LPSK juga diperkuat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi.korban dalam UU ini sudah cukup lengkap dalam hal perlindungan terhadap diri korban dan keluarganya, mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi, dan hak untuk mendapat ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

4. UU Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri No.39 Tahun 2004

TKI di luar negeri sering menjadi obyek *human trafficking*, termasuk kerja paksa, perbudakan, korban kesewenang-wenangan, kekerasan, kejahatan atas martabat dan harkat manusia, serta perlakuan lainnya yang melanggar HAM.

HAM warga negara yang bekerja didalam negeri ataupun diluar negeri wajib dilindungi dan dijamin oleh negara berdasar pada prinsip anti *human trafficking*, anti diskriminasi,

keadilan dan kesetaraan, keadilan sosial, demokrasi, dan persamaan hak³⁵.

UU ini melindungi secara hukum melalui program pembinaan TKI oleh pemerintah dan memberikan advokasi dan bimbingan mulai dari sebelum ditempatkan, saat ditempatkan dan sesudah ditempatkan (Pasal 90).

5. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

Pada UU ini, apabila anak yang menjadi korban *human trafficking*, maka pemerintah akan memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Ayat 2 huruf h) melalui :

- a. Usaha pengawasan
- b. Usaha perlindungan
- c. Usaha pencegahan
- d. Usaha perawatan
- e. Rehabilitasi

Secara garis besar usaha untuk memberikan perlindungan terhadap korban *human trafficking*, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model, yaitu:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Setiap korban TPPO atau ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku/terdakwa. Menurut UU No.21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13, pengertian restitusi yaitu:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Restitusi ini adalah penggantian atas kerugian dari hilangnya kekayaan/penghasilan, biaya perawatan psikologis/medis, penderitaan, dan/atau kerugian lain yang diakibatkan oleh *human trafficking*.³⁶

Untuk mengajukan restitusi, pada Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UU No.21 Tahun 2007, yaitu:

“Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya”.

Pada bunyi pasal tersebut, waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk memberikan restitusi adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak vonis hakim dijatuhkan. Jika hingga batas terakhir terdakwa tidak bisa memenuhinya maka akan diberikan hukuman kurungan sebagai penggantinya.

Selain mekanisme tersebut perlindungan hukum kepada korban juga dapat melalui mekanisme kompensasi yang diberikan oleh

³⁶Farhana., *op.cit.* Hlm. 164

pemerintah sebagai penggantian kerugian. Mekanisme ganti rugi dari Negara adalah mekanisme untuk memberikan layanan kesejahteraan sebab negara pun ikut bertanggungjawab dan secara moral wajib melindungi rakyatnya.³⁷ Menurut Stephen Schafer, terdapat hal yang membedakan antara restitusi dan kompensasi yaitu restitusi yang timbul memiliki sifat pidana dari hasil vonis hakim yang dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaku. Sedangkan kompensasi yang timbul memiliki sifat perdata yang diminta oleh korban dan dibayar oleh warga Negara sebagai wujud tanggungjawab negara/masyarakat.³⁸

Hakim Brebes Ibu Galuh Rahma Esti, S.H.M.H, beliau mengatakan bahwa dalam mengeluarkan putusan mengenai tindak pidana perdagangan manusia, tidak semua putusan pengadilan dalam amar putusannya memberikan ganti rugi berupa restitusi terhadap korban perdagangan manusia³⁹. unsur-unsur didalam Pasal 297 KUHP memperlihatkan jika laki-laki dewasa tidak dilindungi secara hukum apabila dia menjadi korban perdagangan. pertimbangan hakim dalam hal ini apabila laki-laki menjadi korban perdagangan manusia, maka korban berhak juga mendapat hak restitusi. akan tetapi hakim juga memperhatikan fakta persidangan dan hati nurani, memang ada juga

³⁷*Ibid.*, Hlm. 167

³⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.* Hlm. 167

³⁹Wawancara dengan Galuh Rahma Esti, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, di Pengadilan Negeri Kelas I B, tanggal 23 Oktober 2020 jam 13.15- 14.00 WIB

putusan yang tidak memberikan hak pemberian restitusi kepada korban lelaki dewasa.

Menurut UU PTPPO No.21 Tahun 2007, pemberian perlindungan dasar secara hukum kepada korban yang telah diatur mengatur adalah aspek penting dalam penegakkan hukum. Penderitaan korban TPPO sangat diperhatikan oleh negara melalui UU tersebut dengan mekanisme ganti rugi, rehabilitasi sosial dan medis, pemulangan, dan reintegrasi. Hal dikarenakan korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, dan sosial yang diakibatkan oleh TPPO.

Jadi inti dari kewajiban pemberian ganti kerugian memiliki lima tujuan yaitu: untuk meringankan penderitaan korban (jasmani dan rohani), sebagai unsur yang dapat mengurangi vonis hakim, sebagai cara untuk rehabilitasi terdakwa, mempermudah proses peradilan, dan dapat meringankan ancaman/reaksi (balas dendam) dari masyarakat.

2. Layanan Konseling/Bantuan Medis

Korban TPPO akan mendapatkan perlindungan secara fisik ataupun psikis. Keadaan psikis korban akan lebih lama pulih dibandingkan keadaan fisiknya. TPPO ini dapat mengakibatkan dampak selama beberapa bulan, tahun, bahkan korban dapat merasakan trauma seumur hidup⁴⁰. Korban TPPO ini juga dapat

⁴⁰Dra. Farhana, *op.cit*, hlm. 166

mengalami psikotraumatic yaitu mereka merasa tenggelam dalam penderitaan karena tidak menemukan solusi yang baik. Oleh sebab itu, korban perlu didampingi oleh konselor untuk membantunya dalam mengendalikan psikologisnya seperti semula.

Sebagaimana diatur dalam UU PTPPO No.21 Tahun 2007 Pasal 51 Ayat (1), yaitu: “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”. Kementerian atau lembaga yang menangani rehabilitasi wajib memberi rehabilitasi social, kesehatan, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diajukan.

UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Saksi Dan Korban No.13 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) juga mengatur hak korban untuk memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial.

3. Bantuan Hukum

Korban TPPO memiliki hak mendapatkan bantuan hukum. Dari proses pelaporan ke polisi, proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan, hingga proses ke persidangan.

UU PTPPO No.21 Tahun 2007 Pasal 35 menyebutkan “Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”. Korban juga berhak didampingi oleh lembaga yang menaungi perlindungan seperti LPSK, Komnas HAM, KPAI, dll selama proses hukumnya berjalan.

Bantuan hukum yang diberikan kepada korban diminta ataupun tidak, sebab korban didominasi oleh tingkat kesadaran hukum yang rendah⁴¹. Tetapi jika korban pidana tidak dipedulikan tanpa dibantu oleh hukum secara layak maka dapat mengakibatkan semakin terpuruknya keadaan korban TPPO.

4. Pemberian Informasi

Informasi yang diberikan kepada korban/keluarganya terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan TPPO. Adanya informasi tersebut diharapkan fungsi kendali dari masyarakat terhadap kinerja aparat hukum bisa dilaksanakan secara efektif.

UUPTPO No.21 Tahun 2007 Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan “Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya”. Informasi yang diberikan dapat berupa pemberian salinan BAP setiap pemeriksaan.

⁴¹*Ibid.*, Hlm 168

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme untuk mengendalikan kejahatan oleh lembaga (POLRI, kejaksaan, PN, dan LAPAS)⁴². Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme masyarakat untuk menanggulangi kriminalitas⁴³. Menanggulangi diartikan sebagai proses pengontrolan kriminalitas supaya tidak melewati batas toleransi yang ada di masyarakat. Tujuan dari dibentuknya sistem peradilan pidana adalah untuk menjaga dan melindungi ketertiban publik, mengontrol kriminalitas, menangkap dan menahan pelaku kriminalitas, serta memproses secara pidana pelaku kriminalitas.

Dalam sistem hukum di Indonesia, proses perkara pidana biasanya diawali dengan adanya tindak pidana, tindakan tersebut merugikan orang lain, dan ada yang menjadi korban dan mengalami kerugian baik itu materiil maupun kerugian formil. Perkara pidana akan dilakukan proses penyelidikan dengan adanya pelaporan dari korban, orang lain yang mengetahui adanya pemufakatan jahat, maupun orang lain yang merasa dirugikan. Laporan/pengaduan diatur oleh pasal 108 Ayat (1), pasal 108 ayat (3) KUHAP. Dalam ayat (1) menjelaskan untuk pelaporan/pengaduan dari korban yang mengalami, menyaksikan peristiwa, dan menjadi korban tindak pidana, sedangkan dalam ayat (2) dan (3) menjelaskan untuk orang lain yang

⁴²Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁴³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

mengetahui persekongkolan jahat untuk melaksanakan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman umum/jiwa.

Hakim Pengadilan Negeri Brebes Ibu Galuh Rahma Esti mengatakan bahwa wujud dari proteksi hukum terhadap korban pada sistem peradilan pidana⁴⁴, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan, diantaranya yaitu diberikan pendampingan oleh advokat/pendamping lainnya yang dibutuhkan, memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, saksi dan/atau korban TPPO memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya sampai derajat kedua, dan Setiap korban TPPO atau ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Hak pendampingan tersebut sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 35 UU PTPPO.

Bentuk pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan berdasarkan sistem peradilan pidana yaitu:

1. Perlindungan korban perdagangan manusia di tingkat kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

⁴⁴Wawancara dengan Galuh Rahma Esti, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, di Pengadilan Negeri Kelas I B, tanggal 23 Oktober 2020 jam 13.15- 14.00 WIB

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-undang tersebut adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah perlindungan. Perlindungan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan. Kewenangan proses penyelidikan dan penyidikan ada di polri. Adapun kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan manusia adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Perlindungan terhadap korban
- 2) Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi.
- 3) Menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan
- 4) Prevensi umum dan khusus.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan manusia, terutama bagi korban yang tereksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu disetiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan

⁴⁵Farhana, *Op.cit.* Hlm. 125

manusia. Petugas yang dimaksud yaitu polisi yang memiliki keterampilan sosial, memiliki pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah⁴⁶.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 45 Ayat (1) mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, dengan dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat untuk proses pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan manusia. Ruang pelayanan khusus tersebut dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Lebih lanjut dalam Pasal 46 Ayat (1) menjelaskan Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan manusia.

Mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian yang substansinya merupakan instrumen bagi Polri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara

⁴⁶*Ibid.*, Hlm 126

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana⁴⁷. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Perkap tersebut telah diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, antara lain:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Memberikan jaminan keselamatan kepada saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan kepada saksi dan/atau korban untuk kesediaannya memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah;
- h. Mendengarkan keterangan korban;
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Beberapa hak-hak korban dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan

⁴⁷ Bambang Sri Herwanto, *Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Perlindungan, Volume 2 No. 1 Tahun 2012, hal. 65.

tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara eksistensial, hadirnya LPSK diharapkan agar proses penegakan hukum pada umumnya dan penegakan sistem peradilan pidana pada khususnya, dapat semakin mengembirakan dalam wujud pencapaian kepastian hukum dan penciptaan keadilan⁴⁸. Dalam Pasal 12A ayat (1) menyebutkan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan dalam proses peradilan kepada Saksi dan/atau Korban;

⁴⁸ Askari Razak, *Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013, hal 48.

- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia, jika korban menghendaki ganti rugi maka penyidik memberitahukan korban tentang tersedianya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Penyidik kepolisian menyertakan atau melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai informasi yang berhubungan dengan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban.

Undang-Undang telah menyebutkan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada polisi setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian dalam proses penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai hak untuk mengajukan restitusi. Dalam surat dakwaan, penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian yang diderita korban. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Jangka waktu pemberian restitusi yaitu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah inkraacht, apabila dalam tenggang waktu

tersebut pelaku tidak membayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan.

2. Perlindungan korban perdagangan manusia di tingkat kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian, kemudian kejaksaan memeriksa berkas dari polisi. Kejaksaan bagian dari lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan UU. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :“Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim”.

Upaya penyelesaian tindak pidana perdagangan manusia di tingkat penuntutan, maka Kejaksaan mengeluarkan peraturan internal baik yang berupa petunjuk teknis, surat edaran, dan aturan lainnya, yang secara rinci memaparkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh jaksa yang menangani perkara. Beberapa petunjuk teknis tersebut meliputi⁴⁹:

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan sebagai korban, jaksa agung memerintahkan kepada seluruh lembaga kejaksaan di Indonesia untuk mendelegasikan tugas penuntutan kepada jaksa yang mengerti tentang permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan, diutamakan kepada jaksa yang sudah pernah mengikuti pelatihan

⁴⁹Tim ahli hukum dan akademisi serta Tim penulis IOM, *Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, edisi kedua, tahun 2017, Hlm. 45

penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya adalah TPPO.

b. Perlindungan terhadap Korban Kejahatan

Beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-63/E/2/1994 tanggal 4 Februari Tahun 1994 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-187/E/5/1994 tanggal 3 Mei 1995 terkait perlindungan terhadap korban kejahatan meliputi:

- Hakim Ketua dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, apabila dalam pemeriksaan diketahui perkara tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Korban kejahatan sejak awal harus diberitahu haknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi materiil sejak tahap prapenuntutan;
- Kerugian lainnya (yang bersifat imateriil) diajukan melalui gugatan perdata;
- Pendekatan kepada korban perlu dilakukan agar dapat dicapai persepsi perkara yang sama atas perkara yang sedang diperiksa;
- Dalam hal terdakwa dituntut percobaan, perlu diterapkan pasal 14c KUHP;
- Perlu ditempuh usaha-usaha lain yang dapat membantu korban kejahatan.

Ibu Galuh Rahma Esti mengatakan Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia, dalam hal ini korban menjadi saksi dalam

perkaranya, perlindungan yang diberikan dalam kejaksaan yaitu korban didampingi oleh advokat/pendamping lainnya, dirahasiakan identitasnya sampai derajat kedua, kemudian di kejaksaan sudah ada perlindungan terhadap wanita dan anak dalam hal akomodasi antar jemput menggunakan mobil pelayanan yang disediakan di kejaksaan, jadi saksi dalam hadir ke pengadilan tidak datang sendiri, jadi perlindungannya lebih kepada pelayanan, perahasiaan identitas, dan perlindungan tersebut berpedoman pada undang-undang perlindungan saksi dan korban⁵⁰.

3. Perlindungan korban perdagangan manusia di tingkat Pengadilan

Proses pemeriksaan persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Proses penuntutan yang berkasnya telah lengkap dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus perdagangan manusia.

Perlindungan kepada saksi/korban selama persidangan berlangsung, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perlindungan saksi dan/atau korban selama

⁵⁰Wawancara dengan Galuh Rahma Esti, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, di Pengadilan Negeri Kelas I B, tanggal 23 Oktober 2020 jam 13.15- 14.00 WIB

persidangan berjalan, hal yang harus diperhatikan oleh penuntut umum selama persidangan⁵¹:

1) Pencegahan Kontak Langsung antara Terdakwa dengan Saksi/Korban.

Dalam memberikan keterangan dipersidangan Saksi dan/atau korban berhak tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 UU Nomor 21 Tahun 2007), hakim juga berwenang untuk menentukan urutan saksi yang akan didengarkan terlebih dahulu (Pasal 160 Ayat 1a KUHAP). Pasal 160 Ayat 1b KUHAP menyatakan bahwa saksi dan/atau korban harus didengarkan di awal persidangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk segera meninggalkan ruang sidang setelah kesaksian mereka selesai didengar. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar saksi dan/atau korban tidak ada di ruang sidang ketika terdakwa sedang memberikan kesaksian.

2) Layanan Penerjemah.

Saksi dan/atau korban harus mendapat penerjemah yang kompeten dan terpercaya dalam memberikan keterangan di persidangan (Pasal 5 ayat 1d UU No.31 Tahun 2014).

3) Sidang Tertutup.

Dalam pasal 153 KUHAP mengatur tentang perkara yang mengenai kasus kesusilaan harus diperiksa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, baik korban dewasa atau anak. Pasal 153 KUHAP lebih jauh lagi menyatakan bahwa

⁵¹Tim ahli hukum dan akademisi serta Tim penulis IOM, *op.cit*, Hlm 48

perkara pidana yang melibatkankorban anak, terlepas dari bentuk eksploitasinya, harus diperiksa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup.

4) Kehadiran Pendamping.

Saksi dan/atau korban dapat didampingi oleh seorang pendamping yang mereka pilih sendiri (Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2007)

5) Relevansi Barang Bukti dan Pertanyaan.

Relevansi Barang Bukti dan Pertanyaan Di bawah ketentuan Pasal 153 (2) dan juga Pasal 164 (3) KUHAP, majelis hakim berwenang untuk menentukan dapat diterimanya barang bukti di pengadilan. Hakim juga berwenang untuk menolak pengajuan pertanyaan yang dinilai tidak relevan dengan pokok perkara.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia menurut UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya:

- 1) Dalam proses perkaranya korban berhak didampingi oleh advokat atau pendamping lainnya (Pasal 35).
- 2) Berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya dalam proses peradilan (Pasal 36).
- 3) Berhak memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 Ayat 1),

- 4) Pemeriksaan terhadap korban anak, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman (Pasal 40 Ayat 1).
- 5) Berhak memperoleh kerahasiaan identitas korban (Pasal 44 Ayat 1). Hak tersebut juga diberikan kepada keluarganya sampai dengan derajat kedua.
- 6) Korban tindak pidana perdagangan manusia atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi yang dimaksud tersebut berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis atau perawatan psikologinya, penderitaan korban, dan kerugian lainnya. (Pasal 48 Ayat 1-3).

Proses persidangan dalam kasus perdagangan manusia, mengenai keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Sedangkan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat diputus dengan tanpa kehadiran terdakwa. Apabila terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan mengenai keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum diumumkan pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Ibu Galuh mengatakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses persidangan, anak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Untuk kepentingan anak, pemeriksaan di persidangan tidak boleh dihadiri oleh terdakwa, persidangan dilakukan secara tertutup, dan selama proses perkara, anak didampingi oleh orang tua/wali/advokat/pendamping lainnya. Selain hak yang diatur dalam undang-undang, diatur hak lainnya yang meliputi upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan jaminan terhadap keselamatan fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan tersebut tidak semata-mata selesai saat proses perkara kasus perdagangan manusia itu telah selesai dan berkekuatan hukum tetap, tetapi perlindungan tersebut sampai pasca persidangan. Hal ini untuk memulihkan psikis dari rasa trauma akibat dari tindak pidana yang dialaminya⁵².

Jadi dapat disimpulkan perlindungan harus dilakukan sejak awal kasus pelaporan oleh korban ke pihak kepolisian hingga selesai proses pemeriksaan persidangan, bahkan diperlukan pendampingan lebih lanjut oleh lembaga perlindungan terkait untuk pemulihan trauma/gangguan psikis akibat tindak pidana tersebut, terlebih untuk korban anak dan korban perempuan yang mengalami eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan, terhadap perkara tindak pidana perdagangan manusia, penjatuhan pidana terhadap pelaku, dan pemberian restitusi terhadap korban, hakim memberikan putusan berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan

⁵²Wawancara dengan Galuh Rahma Esti, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, di Pengadilan Negeri Kelas I B, tanggal 23 Oktober 2020 jam 13.15- 14.00 WIB

keyakinan hakim. Penjatuhan sanksi dalam kasus perdagangan manusia diantaranya berupa sanksi pidana penjara, sanksi denda, dan sanksi tambahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Korban tindak pidana *human trafficking* dapat dilindungi secara hukum melalui pemberian restitusi dan kompensasi (Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007, Pasal 7 dan 7A UU No. 31 Tahun 2014) selain restitusi dan kompensasi korban berhak mendapat ganti kerugian oleh negara berupa pelayanan kesejahteraan, pemberian layanan konseling/ bantuan medis (berupa reintegrasi sosial dari pemerintah, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pemulangan, bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis), bantuan hukum (mendapat pendampingan dari advokat/pendamping lainnya), dan pemberian informasi mengenai perkembangan perkara (mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan di persidangan).
2. Di Indonesia, sistem peradilan pidana terhadap korban *human trafficking* pada tingkat kepolisian untuk saksi dan/atau korban sebagai bentuk perlindungan hukum dilayani dalam ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, korban berhak mengajukan ganti kerugian pada tahap ini penyidik membuat BAP. Pada tingkat

kejaksaan bentuk perlindungan korban jaksa memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, dan memberikan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban pada saat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Pada tingkat persidangan bentuk perlindungan korban, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

B. Saran

1. Diperlukan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia.
2. Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap korban human trafficking khususnya untuk korban laki-laki dewasa, mengenai pemberian restitusi belum sepenuhnya terealisasi, sehingga perlu upaya untuk memperbaiki hal tersebut dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Serta perlindungan terhadap korban pasca proses perkaraharus terus dilakukan untuk penyembuhan dan memulihkan psikis korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amrullah, Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2018.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta:Bina Cipta, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, 2007

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta:Elsam, 2005.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Akademika Pressindo, 1993

Gultom , Elisanttris, dan Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, 2007

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika aditama, 2012

Hamzani, Achmad irwan, *Pembangunan Huku Nasional*, Yogyakarta : Thafa

Media, 2019.

Hamzah , andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986

Ibrahim, jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Banyumedia Publishing, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika aditama, 2012

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1980

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha, 2006

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 2011.

Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta:Elsam, 2002

Jurnal:

1. Marulak Pardede, *Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Negara Republik Indonesia*, De Jure; Jurnal Penelitian Hukum Vol. 16, 2016.
2. Farhana Mimin Mintarsih, “Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia”.
3. Anggie rizqita dan ridwan arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, *Res Judicat*, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2019
4. Ahmad Syaafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Muwazah*, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2011
5. Bambang Sri Herwanto, “Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Perlindungan, Volume 2, Nomor 1, 2012
6. Askari Razak, “Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume 1, 2013
7. Tim Ahli Hukum dan Akademisi serta Tim Penulis IOM, “Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Edisi kedua, 2017

Skripsi:

Wahyuningsih, Susi, “Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

Wawancara

Wawancara dengan Galuh Rahma Esti, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B, tanggal 23 Oktober 2020 jam 13.15-14.00 WIB

Undang-undang:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

7. Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. H. Achmad
Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag Nomor:
269/K/T/UPS/X/2020
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri
Brebes Nomor: 1012/SK/HK/11/2020/PN Bbs
- Lampiran 3 : Berita Acara Wawancara

LAMPIRAN 1



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Halmahera Km. 1 Tegal, 52121, Telp. (0283) 358745, E-Mail : fh@upstegal.ac.id

Nomor : 269/K/T/UPS/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset

01 Oktober 2020

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Brebes
Di - Tempat

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : RISCHA MAYLINDA
NPM : 5117500244
Alamat : Tanjungsari Rt. 06 Rw. 01 Kec. Wanasari Kab. Brebes
Keperluan : Mengadakan riset untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Judul Riset : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pembimbing I : Dr. Hj. Hamidah Abdurrahman

Pembimbing II : Fajar Dian Aryani, SH, MH

Mohon bantuannya untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN-0615067604

LAMPIRAN 2



PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B

JL. A. YANI NO. 89 ☎ 671006 - 671796
BREBES 52212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor 1012/SK/HK/11/2020/PN Bbs

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes menerangkan bahwa:

Nama : RISCHA MAYLINDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Brebes, 29 Mei 1995
Alamat : Desa Tanjungsari Rt. 006 Rw. 001 Gang 13, Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor pengadilan Negeri Brebes, pada tanggal 3 November 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Brebes

Pada tanggal : 03 November 2020

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes



SUDRAJAT, S.H.

NIP. 196507131994031004

LAMPIRAN 3

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Brebes, dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Brebes, telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.


Brebes, 23 Oktober 2020

Peneliti



Rischa maylinda
NPM. 5117500244

Narasumber



(.....Galuh K. Esti.....)

DRAF WAWANCARA TERSTRUKTUR

Nama Informan : Galuh Rahma Esti, S.H., M.H

Status Informan : Hakim Pengadilan Negeri Brebes

Nama Instansi : Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B

Alamat Instansi : Jl. Jenderal A. Yani No.89, Sangkalputung,
Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah 52218

Hari, Tanggal Wawancara : Jum'at, 23 Oktober 2020

HASIL WAWANCARA	
PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah yang dimaksud tindak pidana perdagangan manusia?	Perdagangan Manusia adalah tindak pidana yang bisa dilakukan perseorangan, korporasi, aparat, dan kelompok yang terorganisir yang melakukan perbuatan mengiming-imingi sesuatu pekerjaan kepada korban, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dan merampas kemerdekaan lain, melakukan eksploitasi, dan melakukan perbudakan yang melanggar Hak Asasi.
2. Siapa yang rentan menjadi korban perdagangan manusia?	Kelompok rentan yang sering menjadi korban adalah wanita dan anak-anak, juga laki-laki dewasa ada yang menjadi korban. Karna wanita dan anak-anak dianggap lemah, dan faktor ekonomi

	yang menyebabkan orang baik wanita, anak, dan lelaki tergiur untuk melakukan pekerjaan yang diiming-imingi pelaku.
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia?	Perlindungan hukum diberikan kepada korban pada saat awal si korban melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada polisi, kemudian berlanjut di Kejaksaan, hingga pengadilan. Korban berhak mendapatkan pendampingan dari advokat/ pendamping lainnya.
4. Apa sajakah bentuk Perlindungan terhadap korban?	Bentuk perlindungannya seperti pemberian bantuan hukum, layanan konseling/bantuan medis, pemberian restitusi dan kompensasi, dan juga pemberian informasi tentang perkembangan perkaranya dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai ke pemeriksaan persidangan.
5. Bagaimana perlindungan hukum di tingkat kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan?	Untuk perlindungan hukum ditingkat penyidikan di kepolisian itu kewenangan polisi, dalam kasus perdagangan manusia, dalam hal ini korban adalah saksi dalam pemeriksaan, maka pengadilan bekerja sama dengan jaksa dalam menghadirkan saksi ke persidangan. Di Kejaksaan sudah disediakan pelayanan

	<p>berupa pendampingan, pelayanan kendaraan. Perlindungan di pengadilan, korban berhak dirahasiakan identitasnya sampai derajat kedua, berhak menyampaikan kesaksian tanpa dihadiri terdakwa, untuk korban anak persidangan tertutup, dan bentuk perlindungan lainnya yang ada dalam undang-undang.</p>
<p>6. Apakah formulai pedoman hakim dalam memberikan perlindungan terhadap korban?</p>	<p>Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, hakim berpedoman pada undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.</p>
<p>7. Apakah perlindungan kepada korban selesai setelah perkara dipengadilan telah diputus?</p>	<p>Untuk korban anak dan wanita yang mengalami eksploitasi seksual, perlindungan terhadap korban diberikan sampai korban benar-benar sembuh dari rasa trauma atas tindak pidana yang dialaminya. Karna tindak pidana perdagangan manusia dapat merugikan baik secara materiil maupun secara immateriil. Dan pemberian perlindungan kepada korban akibat kerugian immateriil dengan cara pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, mendapat bantuan medis, dan pemulihan psikologinya.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risca Maylinda

NPM : 5117500244

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 Mei 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat :Desa Tanjungsari RT 006 RW 001
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes,
52252

Riwayat Pendidikan:

NO	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 1 Tanjungsari	2000	2006
2.	SMP Negeri 2 Wanasari	2006	2009
3.	SMA Negeri 1 Wanasari	2009	2012
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi	2012	2015
5.	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Februari 2021

Hormat Saya,

Risca Maylinda